Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen
Available online at : https://journal.stiebpbatam.ac.id/tractare
DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

Analysis of SIPD Effectiveness in Improving Regional Agency Performance in Budget Planning at Deli Serdang Cooperatives and SMEs Office

Analisis Efektivitas SIPD Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dalam Perencanaan Anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang

Nurhidayah Dalimunthe [1]; Irawan [2]; Galih Supraja[3]
[1,2,3] ***Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Sumatera Utara, Indonesia***
E-mail : [1] hidayahnurdlm@gmail.com

How to Cite :
Dalimunthe, N., Irawan, I., & Supraja, G. (2026). Analysis of SIPD Effectiveness in Improving Regional Agency Performance in Budget Planning at Deli Serdang Cooperatives and SMEs Office. Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen, 9 (2). DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

ARTICLE HISTORY
Received [28 September 2026]
Revised [22 November 2026]
Accepted [26 November 2026]

KEYWORDS
Budget Planning; Effectiveness; Performance; SIPD.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas SIPD dalam perencanaan anggaran serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 3 informan kunci yaitu Kasubbag Program, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Operator SIPD. Penelitian menggunakan New Public Management (NPM) sebagai teori utama untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi yaitu SIPD dan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai teori pendukung untuk menjelaskan efektivitas penerimaan teknologi informasi yaitu SIPD melalui persepsi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup efektif tetapi belum optimal. Berdasarkan perspektif NPM, SIPD mendukung tata kelola perencanaan anggaran menjadi lebih terstruktur, terukur, dan berorientasi pada hasil, namun efisiensi sumber daya manusia masih menghadapi kendala karena terdapat pegawai yang menjalankan pekerjaan diluar tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan perspektif TAM, pegawai memiliki persepsi positif terhadap kebermanfaat SIPD (perceived usefulness), namun pegawai belum memiliki persepsi positif sepenuhnya terhadap kemudahan penggunaan SIPD (perceived ease of use) karena tampilan SIPD yang kurang intuitif, gangguan server, pembaruan sistem secara berkala serta keterbatasan pelatihan. SIPD berkontribusi meningkatkan kinerja melalui efisiensi waktu, kualitas dokumen perencanaan, transparansi dan akuntabilitas, orientasi terhadap ouput dan outcome serta tata kelola keuangan daerah yang lebih terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan pembagian tugas pegawai secara efisien, penguatan infrastruktur jaringan serta peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis atau pelatihan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) in budget planning and its contribution to improving the performance of the Department of Cooperatives and SMEs of Deli Serdang Regency. This study employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving three key informants: the Head of the Program Subdivision, a Junior Expert Financial Analyst for Central and Regional Government, and the SIPD Operator. The study applies New Public Management (NPM) as the main theoretical framework to explain the effectiveness of public sector management through the use of information technology, particularly SIPD. The Technology Acceptance Model (TAM) serves as a supporting framework to examine the acceptance of SIPD based on users' perceptions. The findings indicate that the implementation of SIPD in budget planning at the Department of Cooperatives and SMEs of Deli Serdang Regency has been fairly effective, although it has not yet achieved its full potential. From the NPM perspective, SIPD supports a more structured, measurable, and results-oriented budget planning process. However, human resource efficiency remains a challenge, as some employees perform tasks beyond their primary duties and responsibilities. From the TAM perspective, employees generally have positive perceptions of SIPD's usefulness (perceived usefulness). However, their perceptions of its ease of use (perceived ease of use) are not entirely positive due to its less intuitive interface, server disruptions, periodic system updates, and limited training opportunities. Furthermore, SIPD contributes to improved organizational performance by increasing time efficiency, enhancing the quality of planning documents, strengthening transparency and accountability, promoting an output- and outcome-oriented approach, and improving the integration of regional financial management. This study recommends a more efficient distribution of employee responsibilities, improvements to network infrastructure, and enhanced employee competencies through technical guidance and training programs.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada proses perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, serta alokasi anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Kumalasari & Fanida, 2024). Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah dalam satu platform sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Any et al., 2025). Implementasinya kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam pengelolaan informasi pembangunan serta keuangan daerah. Namun, implementasi SIPD di lapangan kenyataannya tidak selalu berjalan lancar. Masih ditemukan berbagai kendala baik teknis maupun non teknis meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, gangguan server, pembaruan aplikasi secara berkala, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas SIPD. Sejumlah studi menyimpulkan bahwa SIPD telah berjalan cukup efektif atau efektif meskipun belum optimal

Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen
Available online at : https://journal.stiebpbatam.ac.id/tractare
DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

(Nasution & Nurwani, 2021; Adisi & Sadad, 2022; Tumija & Erlambang, 2023; Rahman & Sinurat, 2025; Fikriyah et al., 2026). Sebaliknya sejumlah studi lain menyimpulkan bahwa SIPD belum efektif atau kurang efektif karena perubahan nomenklatur, penerapan yang belum menyeluruh, kualitas sistem, dan kesenjangan persepsi pengguna (Ekaputra, 2021; Vitriana et al., 2022; Hasanah & Djasuli, 2025; Damayanti et al., 2025; Kristiani et al., 2026). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan bahwa efektivitas SIPD belum dapat dipahami secara seragam pada setiap perangkat daerah karena dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, kondisi infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan SIPD dalam perencanaan anggaran sejak tahun 2021 sebagai pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya digunakan. Berdasarkan observasi awal melalui wawancara pra-penelitian, ditemukan kendala teknis dan non teknis penggunaan SIPD dalam proses perencanaan anggaran, yaitu server yang lambat atau tidak dapat diakses terutama pada saat penginputan Ranwal Renja atau Renja Perubahan, adanya nomenklatur Sub Kegiatan yang dinonaktifkan pada perencanaan tahun 2027 dikarenakan pemutakhiran nomenklatur pada database SIPD secara berkala, serta keterbatasan kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem.

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas, peneltian ini menjadi penting untuk dilakukan karena SIPD digunakan sebagai instrumen utama dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Apabila SIPD belum mampu berfungsi secara efektif, maka proses perencanaan anggaran berpotensi mengalami keterlambatan, revisi dokumen berulang hingga menurunnya kualitas pengambilan keputusan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Madeten et al. (2025) yang berjudul "Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai" dengan perbedaan utama pada lokasi penelitian yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dan landasan teori yang mengintegrasikan New Public Management (NPM) sebagai teori utama untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIPD dan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai teori pendukung untuk menjelaskan efektivitas penerimaan teknologi informasi yaitu SIPD melalui persepsi pengguna sehingga analisis efektivitas SIPD terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dalam perencanaan anggaran dapat dikaji secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) efektivitas SIPD dalam perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang; (2) kontribusi penggunaan SIPD terhadap peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan anggaran; serta (3) faktor pendukung dan penghambat penerapan SIPD dalam perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

LANDASAN TEORI

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) pertama kali dikemukakan oleh Hood (1991) sebagai konsep manajemen sektor publik yang mengadopsi prinsip dan praktik manajemen sektor swasta ke dalam organisasi pemerintahan dengan menekankan efisiensi, efektivitas, orientasi pada hasil, dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik. NPM memiliki tujuh karakteristik: (1) manajemen profesional di sektor publik; (2) adanya standar dan ukuran kinerja; (3) penekanan yang lebih besar pada output dan outcome; (4) pemecahan unit-unit kerja di sektor publik; (5) menciptakan persaingan di sektor publik; (6) pengadopsian manajemen sektor bisnis ke sektor publik; dan (7) penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Dalam penelitian ini, NPM digunakan untuk menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi yaitu SIPD merupakan salah satu wujud reformasi manajemen sektor publik dalam pengelolaan perencanaan anggaran agar lebih profesional, terukur, efisien dan berorientasi pada hasil.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi berdasarkan keyakinan melalui dua konstruk, yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kebermanfaatan menggambarkan keyakinan pengguna bahwa teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya, diukur melalui enam indikator: mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas, mempermudah pekerjaan, dan bermanfaat secara keseluruhan. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan menggambarkan keyakinan bahwa teknologi dapat digunakan tanpa membutuhkan banyak usaha, diukur melalui enam indikator: mudah dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah menjadi mahir, dan mudah digunakan. Dalam penelitian ini, TAM digunakan untuk menganalisis penerimaan pegawai terhadap SIPD melalui persepsi mengenai manfaat dan kemudahan sistem dalam mendukung perencanaan anggaran.

Efektivitas, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan Anggaran dan Kinerja

Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, yang tercermin dari kesesuaian antara hasil dan tujuan (Mardiasmo, 2017; Beni, 2016; Pantow et al., 2019). SIPD adalah sistem informasi yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah untuk mendukung e-government dan tata kelola yang baik (Susanti, 2025; Ekaputra, 2021; Nadya & Wurara, 2020). Perencanaan anggaran adalah tahapan penyusunan rencana kegiatan yang dinyatakan dalam anggaran, mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, dan pengalokasian sumber daya (Mardiasmo, 2018; Salwah, 2019; Triastuti, 2026). Kinerja adalah hasil kerja individu atau kelompok dari sisi kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2022; Sutrisno, 2019; Afandi, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lim (2025) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interpretasi makna, konteks, dan pengalaman partisipan. Nawawi (2019) menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu objek tertentu. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta permasalahan efektivitas SIPD melalui kerangka NPM dan TAM. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama No. 4, Desa Perbarakan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena telah menggunakan SIPD sejak tahun 2021 dan ditemukan fenomena nyata yang relevan mengenai dinamika penerapan SIPD di tingkat perangkat daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penggunaan SIPD. Dalam penelitian kualitatif,

Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen
Available online at : https://journal.stiebpbatam.ac.id/tractare
DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

kecukupan informan ditentukan bukan oleh jumlah tetapi oleh kedalaman informasi dan kesesuaian informan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019; Moleong, 2018). Adapun informan sebanyak 3 orang, terdiri dari Kasubbag Program, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dan Operator SIPD.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi serta dokumen resmi yang berkaitan dengan SIPD dan perencanaan anggaran seperti Renstra, Renja, RKA, DPA.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap secara berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara simultan selama penelitian berlangsung. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, bagan alur, dan tabel yang sistematis untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan hasil interpretasi terhadap keseluruhan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta melakukan member checking melalui konfirmasi ulang terhadap data dan interpretasi hasil wawancara kepada para informan untuk menghindari kesalahan pemaknaan serta memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 59 perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang dibantu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Efektivitas SIPD dalam Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIPD pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang berdasarkan teori utama New Public Management (NPM) (Hood, 1991) dapat dilihat melalui tujuh karakteristik sebagai berikut:

Pertama, manajemen profesional di sektor publik didukung oleh adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kejelasan tanggung jawab dalam proses perencanaan anggaran.

“Setiap tugas kami masing-masing bidang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.” (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Kedua, standar dan ukuran kinerja telah diterapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun setiap tahun dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas. “Untuk menilai kinerja organisasi biasanya dilihat dari tercapai atau tidaknya target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK). Ini disusun pada awal tahun dan akan dievaluasi setiap triwulannya oleh

Kepala Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas kepada Bupati". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Ketiga, penekanan yang lebih besar pada output dan outcome terlihat dari penggunaan penganggaran berbasis kinerja. SIPD menghubungkan alokasi anggaran dengan program, kegiatan, subkegiatan, keluaran (output), hasil (outcome), dan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen DPA-SKPD. "Jadi, dalam DPA itu ada ditampilkan rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keluaran (Output). Ini berasal dari sistem SIPD yang telah dibakukan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan hingga kini terus dimutakhirkan. Sedangkan untuk Hasil (Outcome) dan target bersumber dari Cascading. Cascading ini isinya penjabaran tujuan, sasaran dan target kinerja SKPD". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik terlihat dari Kasubbag Program bertanggungjawab dalam menyusun dokumen perencanaan sedangkan Kasubbag Keuangan bertanggungjawab dalam mengelola dan membuat laporan keuangan. "Saya sebagai Kasubbag Keuangan bertanggungjawab dalam menyusun dan mengendalikan arus kas masuk dan keluar agar selaras dengan dokumen perencanaan melalui aplikasi SIPD. Disamping itu, saya juga membuat laporan keuangan SKPD menggunakan aplikasi SIPD". (Wawancara dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)

Kelima, menciptakan persaingan di sektor publik melalui mekanisme kontrak dan tender yang rinciannya wajib diinput kedalam SIPD. Sistem tersebut juga mengendalikan sisa pagu anggaran agar pembayaran tidak melampaui nilai kontrak yang tersedia. "Bendahara Pengeluaran tidak bisa membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kontraktual jika data kontrak belum sah di SIPD. Nanti SIPD ini akan otomatis membaca sisa pagu kontrak setiap terminnya supaya tidak terjadi lebih bayar". (Wawancara dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)

Keenam, pengadopsian manajemen sektor bisnis ke sektor publik dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi yaitu SIPD dalam perencanaan anggaran lebih kurang sudah berjalan selama 5 tahun sejak tahun 2021. "Kami Sub Bagian Program sudah menggunakan SIPD dalam menyusun anggaran sejak tahun 2021. Sebelumnya dulu kami menggunakan SIMDA yang dari BPKP". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya telah didukung oleh penggunaan aplikasi absensi digital. Namun, efisiensi sumber daya manusia belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat pegawai yang menjalankan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya akibat keterbatasan jumlah pegawai. "Absensi kami sudah pakai aplikasi Deli Serdang Sehat. Jadi nanti terekam jam kami masuk apa tepat waktu atau terlambat. Nah, kalau cerita tentang pekerjaan sesuai perintah saja. Jika atasan menunjuk kita ya kita harus laksanakan, walaupun itu diluar tupoksi. Karena disini juga kekurangan pegawai". (Wawancara dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)

Selanjutnya, hasil penelitian efektivitas penerimaan teknologi informasi yaitu SIPD pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang berdasarkan teori pendukung Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) dapat dilihat melalui dua konstruk utama, yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use).

Hasil penelitian berdasarkan persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dapat dilihat melalui enam indikator sebagai berikut yaitu pertama, SIPD dinilai mempercepat pekerjaan karena membuat penyusunan Renja, RKA hingga DPA terintegrasi dalam satu platform tanpa input berulang. "Kami cukup input di satu aplikasi SIPD itu saja. Nanti dia langsung sinkron hingga menjadi DPA. Jadi kami ngak perlu input berulang di banyak aplikasi berbeda". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Kedua, SIPD meningkatkan kinerja karena membuat hasil dokumen perencanaan menjadi lebih akurat dibandingkan manual. "Dengan menggunakan SIPD ini kinerja kami dalam menyusun anggaran menjadi meningkat. Karena cukup input di satu aplikasi saja jadinya lebih cepat kan. Terus

Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen
Available online at : https://journal.stiebpbatam.ac.id/tractare
DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

karena menggunakan sistem sudah pasti hasilnya lebih akurat dan menghidari kesalahan perhitungan dibandingkan kerja manual". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Ketiga, meningkatkan produktivitas dilihat dari perhitungan otomatis SIPD menghilangkan koreksi manual sehingga waktu dapat dialihkan untuk menganalisis rincian belanja. "Perencanaan anggaran dilakukan manual sudah pasti disediakan waktu untuk mengecek manatau ada kesalahan perhitungan. Kalau pakai SIPD ini kan tidak. Perhitungannya sudah otomatis by sistem jadi waktunya bisa dilanjutkan untuk merekap rincian belanja sesuai rutin dan teknis". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Keempat, SIPD dinilai meningkatkan efektivitas karena membantu menyusun dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA) yang akurat, tepat waktu dan sesuai nomenklatur. "Karena menggunakan sistem SIPD, membantu kami dalam menyusun dokumen perencanaan tepat waktu dan akurat. Setiap rincian belanja yang diinput pada sub kegiatan yang dipilih juga akan otomatis rincian program dan kegiatannya sesuai nomenklatur yang berlaku". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Kelima, SIPD mempermudah pekerjaan karena tersedia kotak dialog input yang terstruktur dan serta kode program, kegiatan dan sub kegiatan yang otomatis sesuai nomenklatur yang berlaku. "Untuk menginput belanja didalam SIPD, sudah tersedia format yang harus diisi jadi memudahkan kita dalam menyusun anggaran. Kode program, kegiatan dan sub kegiatan juga sudah otomatis sehingga kita tidak perlu lagi mencari kode tersebut dalam nomenklatur Permendagri". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Keenam, SIPD dinilai bermanfaat secara keseluruhan karena menyusun perencanaan anggaran menjadi lebih cepat, akurat dan terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga menyederhanakan proses penyusunan dokumen perencanaan. "SIPD ini sangat membantu sih, terutama dalam menyusun anggaran karena prosesnya terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga lebih efektif tanpa proses input berulang di aplikasi berbeda". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Hasil penelitian berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dapat dilihat melalui enam indikator sebagai yaitu pertama, SIPD dinilai cukup mudah dipelajari namun tingkat kemudahannya sangat bergantung pada pemahaman teknis pegawai sehingga memerlukan pelatihan dan sosialisasi pada tahun 2021 dinilai tidak cukup. "Menurut saya, SIPD ini cukup mudah dipelajari bagi pegawai yang punya pemahaman awal tentang alur pengelolaan keuangan daerah tapi praktik langsungnya butuh pelatihan. Karena dulu kami ikut sosialisasi aja tidak cukup, banyak hal dalam pengoperasian SIPD ini yang perlu dipelajari". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Kedua, SIPD dapat dikontrol dilihat dari proses perencanaan anggaran dapat dipantau, diawasi, dan dikendalikan secara real-time oleh pihak yang berwenang melalui hak akses akun SIPD serta sistem SIPD akan secara otomatis mengunci atau menolak proses jika input anggaran melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. "Menginput anggaran di SIPD itu harus diperhatikan juga batasan pagunya. Karena kalau sudah melebihi batasan pagu dia enggak akan bisa tersimpan ada notifnya dia". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Ketiga, SIPD dinilai jelas dan dapat dipahami karena menampilkan kolom hasil perhitungan koefisien, harga hingga total dari setiap rincian belanja yang diinput. "Sistem perhitungan SIPD jelas dia menampilkan hasil perhitungannya. Bagaimana selisih bertambah dan berkurangnya rincian belanja yang kita input bahkan kondisi sebelum dan sesudah rincian belanja yang kita input. Jadi saat membaca dokumennya nanti kita bisa mudah memahaminya". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Keempat, SIPD dinilai fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama memiliki koneksi internet. "SIPD ini sudah pasti fleksibel. Karena dia kan sistem online jadi bisa diakses darimana aja dan kapan aja selagi ada internet". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Kelima, SIPD dinilai tidak terlalu mudah untuk menjadi mahir karena adanya pembaruan secara berkala yang membuat pegawai harus terus menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru. "SIPD ini bisa dibilang tidak terlalu mudah untuk kita bisa mahir. Karena semua tergantung

pengalaman praktik kita selama menggunakannya. Apalagi SIPD ini sering ada pembaruan seperti pada penganggaran tahun 2027 tiba-tiba ada nomenklatur Sub Kegiatan yang dinonaktifkan karena pemutakhiran tanpa adanya info. Ini membuat dokumen Renja Tahun 2027 tidak sinkron dengan Renstra 2025-2029 yang sudah kami susun". (Wawancara dengan Kasubbag Program)

Keenam, tingkat kemudahan penggunaan SIPD dinilai masih rendah karena tampilan SIPD yang kurang intuitif serta menu/fitur yang bercabang dan membingungkan dan seringnya terjadi gangguan server yang lambat atau tidak dapat diakses (down) terutama pada saat penginputan Ranwal Renja atau Renja Perubahan.

"Server SIPD ini juga sering lambat/down apalagi saat penginputan Ranwal Renja atau Renja Perubahan. Dan seringnya ini kejadiannya di siang hari karena banyak yang pakai dan itu bisa hitungan jam atau seharian. Kalau udah kek gini kita gabisa input anggaran pada sistem jadi gak mudah juga digunakan SIPD ini". (Wawancara dengan Operator SIPD)

Kontribusi SIPD terhadap Peningkatan Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD berkontribusi meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dalam perencanaan anggaran yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu, SIPD mempercepat proses penyusunan dokumen Renja, RKA, DPA karena terintegrasi dalam satu aplikasi.
2. Kualitas Dokumen Perencanaan, SIPD melakukan perhitungan secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi dokumen perencanaan karena mengurangi kesalahan perhitungan (human error) yang sering terjadi pada proses manual.
3. Transparansi dan Akuntabilitas, SIPD menampilkan anggaran secara real time dan menyediakan mekanisme pembatasan hak akses, validasi oleh Eselon II/Kepala Dinas serta pengendalian pagu anggaran sehingga proses perencanaan lebih terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Orientasi terhadap Ouput dan Outcome, SIPD menghubungkan alokasi anggaran dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Keluaran (Output), Hasil (Outcome) serta target kinerja sehingga anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana, tetapi juga pencapaian hasil kinerja.
5. Tata Kelola Keuangan yang Terintegrasi, penggunaan SIPD mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien dari yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing daerah menuju sistem yang lebih terintegrasi yaitu SIPD yang bersifat terpusat dan terintegrasi secara nasional.

Faktor Pendukung dan Penghambat SIPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat penerapan SIPD dalam perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang yang dapat dilihat sebagai berikut:

Faktor pendukung

1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang memberikan landasan pembagian tanggung jawab pegawai dalam proses perencanaan anggaran.
2. Perjanjian Kinerja (PK) menjadi standar dan ukuran pencapaian kinerja organisasi maupun pegawai.
3. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memudahkan sinkronisasi inputan rincian belanja sesuai nomenklatur yang berlaku.

Tractare Jurnal Ekonomi-Manajemen
Available online at : https://journal.stiebpbatam.ac.id/tractare
DOI: https://doi.org/10.62820/trt.v9i2

Faktor Penghambat

1. Adanya Nomenklatur Sub Kegiatan yang dinonaktifkan pada perencanaan tahun 2027 dikarenakan pemutakhiran nomenklatur database SIPD secara berkala. Hal ini menyebabkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 tidak sinkron dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang.
2. Server yang sering lambat atau tidak dapat diakses (down) terutama pada saat penginputan Ranwal Renja atau Renja Perubahan sehingga berpotensi memperlambat penyelesaian dokumen perencanaan.
3. Keterbatasan pegawai yang memiliki kompetensi atau pemahaman teknis mengenai alur pengelolaan keuangan daerah serta pengoperasian berbagai fitur aplikasi SIPD sehingga membutuhkan bimbingan teknis atau pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal.

Pembahasan

Efektivitas SIPD dalam Perencanaan Anggaran

Berdasarkan teori utama New Public Management (NPM) Hood (1991), efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIPD dapat dipahami melalui perubahan tata kelola organisasi menuju pengelolaan yang lebih profesional, terukur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SIPD mampu meningkatkan tata kelola perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang menjadi lebih terstruktur, terukur dan berorientasi pada hasil. Namun, dalam hal efisiensi sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pegawai yang menjalankan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 memberikan dasar pembagian tugas dalam perencanaan anggaran. Sementara itu, PK menjadi instrumen untuk menetapkan target dan mengukur pencapaian kinerja pegawai. Kedua aspek tersebut memperlihatkan bahwa penerapan SIPD tidak berdiri sendiri sebagai penggunaan aplikasi, tetapi menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang memiliki pembagian tanggung jawab dan standar kinerja. Orientasi terhadap output dan outcome juga terlihat dari keterkaitan antara program, kegiatan, subkegiatan, alokasi anggaran, dan target kinerja dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, perencanaan tidak hanya berorientasi pada penyediaan dan penyerapan dana, tetapi juga pada pencapaian sasaran kegiatan. Mekanisme kontrak dan tender juga dilakukan melalui SIPD sebagai kendali digital terhadap kontrak yang diterbitkan serta mengunci pagu anggaran kontrak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum otomatis menyelesaikan persoalan pembagian beban kerja. SIPD dapat menyederhanakan proses administrasi, tetapi organisasi tetap membutuhkan jumlah dan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamid H (2022) yang menemukan bahwa implementasi NPM pada Dinas PMPTSP Kota Makasar masih menemukan penggunaan sumber daya staf yang melaksanakan pekerjaan belum sesuai tugasnya (rangkap pekerjaan) sehingga jumlah dan kualitas staf perlu ditingkatkan.

Berdasarkan teori pendukung Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989), efektivitas penerimaan teknologi informasi yaitu SIPD melalui dua konstruk utama, yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai memiliki persepsi positif terhadap kebermanfaatan SIPD karena dapat mempercepat penyusunan anggaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, meningkatkan kinerja dan menyederhanakan pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution & Irawan (2026) yang menguji dampak kebermanfaatan SIPD terhadap kepuasan pengguna ditemukan signifikan dimana kepuasan pengguna terhadap SIPD tercermin dari manfaat yang dirasakan dalam mempercepat pekerjaan administrasi, meminimalkan kesalahan input data, serta mempermudah pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah. Oleh

karena itu, SIPD berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai pendukung produktivitas dan efektivitas kerja. Namun, pegawai belum memiliki persepsi positif sepenuhnya terhadap kemudahan penggunaan SIPD karena tampilan SIPD yang kurang intuitif, sering terjadinya gangguan server, pembaruan sistem tanpa adanya pendampingan serta keterbatasan pelatihan. Temuan ini sejalan dengan: Pertama, sejalan dengan penelitian Nasution & Nurwani (2021) yang menemukan bahwa penerapan SIPD di BKAD Kota Medan cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala kualitas sistem dan kebutuhan bimbingan teknis; Kedua, sejalan dengan penelitian Fikriyah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Batang cukup efektif tetapi belum optimal karena stabilitas server yang sering terganggu pada periode puncak penganggaran; dan Ketiga, sejalan dengan penelitian Ekaputra (2021) yang menemukan kendala SIPD berupa perubahan nomenklatur program dan kegiatan secara menyeluruh yang mengganggu keselarasan dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk.

Kontribusi SIPD terhadap Peningkatan Kinerja

Pertama, kontribusi terhadap efisiensi waktu terlihat dari integrasi penyusunan Renja, RKA, dan DPA dalam satu aplikasi sehingga mengurangi penggunaan waktu kerja untuk aktivitas administratif yang berulang. Waktu tersebut dapat dialihkan untuk menganalisis kebutuhan program dan menentukan prioritas anggaran. Kedua, kontribusi terhadap kualitas dokumen perencanaan terlihat dari hasil perhitungan rincian belanja yang akurat karena otomatis oleh sistem. Hal ini mengurangi risiko kesalahan perhitungan apabila dilakukan manual. Ketiga, kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas terlihat dari sistem yang menampilkan anggaran secara real time, pembatasan hak akses pengguna, validasi oleh pejabat berwenang, dan pengendalian pagu anggaran. Kasubbag Program dapat melakukan penginputan dan verifikasi, sedangkan validasi akhir dilakukan melalui akun Kepala Dinas. Sistem juga menolak penyimpanan apabila nilai anggaran melampaui pagu yang tersedia. Mekanisme ini memperkuat pengawasan internal karena setiap tahapan memiliki kewenangan yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sijabat et al. (2024) pada DPRD Kota Medan yang menunjukkan bahwa manfaat penggunaan SIPD menjadi faktor pendukung penerapannya, yang tercermin dari proses administrasi yang lebih cepat, pencatatan keuangan yang lebih akurat, dan transparansi data yang meningkat. Keempat, kontribusi terhadap orientasi output dan outcome terlihat dari keterhubungan antara alokasi anggaran dengan program, kegiatan, subkegiatan, keluaran, hasil, dan target kinerja. Keterhubungan tersebut membantu organisasi memastikan bahwa anggaran yang disusun mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Madeten et al. (2025) pada Satpol PP Kabupaten Dogiyai yang menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mampu meningkatkan efisiensi penyusunan RKA dan mengoptimalkan alokasi anggaran melalui penerapan program yang berorientasi pada kinerja. Kelima, kontribusi terhadap integrasi tata kelola keuangan terlihat dari penggunaan SIPD sebagai platform terpusat dalam proses perencanaan anggaran. Integrasi tersebut mempermudah penyelarasan data dan dokumen sehingga proses perencanaan menjadi lebih sistematis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supraja (2024) yang menguji dampak penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja ditemukan hubungan yang signifikan dan positif dimana penggunaan sistem informasi akuntansi mendorong pengelolaan keuangan secara lebih sistematis sehingga meningkatkan kelancaran proses dan kinerja penggunanya.

Faktor Pendukung dan Penghambat SIPD

Faktor pendukung penerapan SIPD dalam perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari adanya Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang mendukung kejelasan tanggung jawab pegawai dalam proses perencanaan anggaran, Perjanjian Kinerja (PK) yang memberikan standar dan ukuran pencapaian kinerja bagi organisasi maupun pegawai serta Permendagri No. 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang membantu keselarasan inputan rincian belanja sesuai nomenklatur yang berlaku. Sementara itu, faktor penghambat yang pertama yaitu adanya pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan pada perencanaan tahun 2027 yang menyebabkan ketidaksinkronan dokumen Renja Tahun 2027 dengan Renstra Tahun 2025-2029 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ekaputra (2021) yang menemukan kendala SIPD berupa perubahan nomenklatur program dan kegiatan secara menyeluruh yang mengganggu keselarasan dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Faktor penghambat kedua yaitu ketidakstabilan server yang menghambat proses penginputan terutama pada saat penyusunan Ranwal Renja atau Renja Perubahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fikriyah et al. (2026) yang menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam penyusunan anggaran pada Disdukcapil Kabupaten Batang cukup efektif tetapi belum optimal karena stabilitas server yang sering terganggu pada periode puncak penganggaran. Faktor penghambat ketiga yaitu keterbatasan kompetensi SDM pegawai dalam memahami dan mengoperasikan berbagai fitur SIPD sehingga pegawai membutuhkan bimbingan teknis, pelatihan serta praktik langsung agar dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution & Nurwani (2021) dan penelitian Rahman & Sinurat (2025) yang menekankan perlunya pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan SIPD. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kompetensi pengguna dan infrastruktur jaringan bukan hanya terjadi pada satu perangkat daerah, tetapi menjadi tantangan dalam penerapan SIPD di berbagai wilayah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah berjalan cukup efektif tetapi belum optimal dalam mendukung perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan teori New Public Management (NPM), SIPD mampu meningkatkan tata kelola perencanaan anggaran menjadi lebih terstruktur, terukur dan berorientasi pada hasil. Namun, efisiensi sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pegawai yang menjalankan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM), pegawai memiliki persepsi positif terhadap kebermanfaatan SIPD, namun belum sepenuhnya terhadap kemudahan penggunaan karena tampilan SIPD yang kurang intuitif, gangguan server, pembaruan sistem tanpa adanya pendampingan serta keterbatasan pelatihan.

Penggunaan SIPD memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang melalui efisiensi waktu, kualitas dokumen perencanaan, transparansi dan akuntabilitas, orientasi terhadap output dan outcome serta tata kelola keuangan daerah yang lebih terintegrasi. Pemanfaatan SIPD juga mendukung pengendalian anggaran dan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan target kinerja perangkat daerah.

Faktor pendukung penerapan SIPD meliputi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang No. 79 Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) yang menunjukkan standar dan ukuran kinerja perangkat daerah maupun pegawai serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang membantu proses penyusunan anggaran secara terstruktur sesuai nomenklatur yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat meliputi adanya pemutakhiran nomenklatur Sub Kegiatan, ketidakstabilan server dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas SIPD dengan cakupan yang lebih luas tidak hanya pada tingkat perangkat daerah dan tahapan perencanan anggaran namun hingga ke tingkat kabupaten maupun provinsi dengan tahapan pengelolaan keuangan daerah lainnya.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat menerapkan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai sesuai ketentuan agar pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, melakukan penguatan infrastruktur jaringan serta meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengajukan pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan kepada perangkat daerah terkait khususnya ketika terdapat pembaruan fitur SIPD maupun perubahan nomenklatur perencanaan dan penganggaran.

PERNYATAAN TRANSPARANSI DAN ETIKA

1. **Kontribusi Penulis CRediT (Contributor Roles Taxonomy): ND:** Konseptualisasi, metodologi, investigasi, pengumpulan data, analisis formal, dan penulisan draf asli. **I:** Supervisi, validasi, pengembangan metodologi, penulisan, telaah dan penyuntingan naskah. **GS:** Supervisi, validasi, analisis formal, penulisan, telaah dan penyuntingan naskah.
2. **Pendanaan:** Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.
3. **Konflik Kepentingan:** Para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan.
4. **Persetujuan Etik dan Partisipan:** Penelitian ini melibatkan tiga informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan penelitian memperhatikan prinsip etika penelitian, persetujuan partisipan, serta perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh informan.
5. **Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial:** Penulis tidak menggunakan AI generatif dalam penyusunan naskah ini. AI tidak dapat dicantumkan sebagai penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Adisi, C. A., & Sadad, A. (2022). Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 150-164. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581

Afandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Yogyakarta: Nusa Media

Any, A., Arniwita, A., & Suryani , A. I. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI. Jurnal Development, 13(2), 474–487. https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.715

Beni .P., (2016). Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. Jakarta: Taushia

Damanik, I. M., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2025). OPEN GOVERNMENT FRAMEWORK AND PERFORMANCE: AN INTERACTION APPROACH WITHIN THE CONCEPT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT FOR LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 23(11). https://doi.org/10.52152/141dwn79

Damayanti, S. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. Journal Publicuho, 8(2), 1184-1189. https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/788/522

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340. https://doi.org/10.2307/249008

Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam penyusunan dokumen RKPD DI Kabupaten Nganjuk. Otonomi, 21(1), 62-79. https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606

Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(3), 403-428. https://www.neliti.com/publications/44776/download/36339

Fikriyah, S., Arochman, A., & Rusli, C. Y. (2026). EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIPD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DISDUKCAPIL KAB. BATANG. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13(5), 126-133. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i5.857

Hamid, H. (2022). Implementasi new public management (npm) dalam pelayanan publik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota makassar. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 4(2), 117-123. https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/3064/1470

Hasanah, M., & Djasuli, M. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(5. C), 156-164. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10402

Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. Public administration, 69(1), 3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Irawan, I. R. N., & Sani, A. ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF DISTRICT FINANCIAL REPORTS.

Irawan, I., Muda, I., Juzilam, S., & Situmeang, C. (2026). Open Government Framework Model to Performance for Local Governments in Indonesia. In The Future of Work: How Technology is Transforming Jobs and Skills (pp. 675-684). Cham: Springer Nature Switzerland. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-87372-0_58

Kristiani, R., Lambe, K. H., & Malissa, M. (2026). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah. Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC), 2(1), 40-48. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/download/1338/1084

Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Efektivitas Penggunaan Platform SIPD di Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta). Publika, 381-394. https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p381-394

Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. Australasian Marketing Journal, 32(2), 199-229. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/14413582241264619

Lita, L. H. G., Syahputri, A., Niswa, K., & Harnia, A. (2025). MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 8(1), 1-12. https://doi.org/10.26533/jad.v8i1.1494

Madeten, E., Lambe, K. H. P., & Baharuddin, B. (2025). Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1(2), 51-60. https://doi.org/10.8844/92rj4k92

Mangkunegara, A. P. (2022). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. (2017). Perpajakan edisi terbaru. Bandung: Andi Publisher.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.

Nasution, A. P., & Irawan, I. (2026). SIPD User Satisfaction In The North Sumatra Regional Government Using The Delone And Mclean Model Approach. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital, 5(1), 273-278. https://doi.org/10.37676/jambd.v5i1.9996

Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109-116. https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577

Nawawi, Hadari, 2019. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pantow, C., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. J. Eksek, 3(3), 1-11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25489

Permendagri 70. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019

Rahman, D. F., & Sinurat, M. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Doctoral dissertation, IPDN). http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24542

Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintaha Kota Banda Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2), 164-182. https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/110/58

Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota. Jurnal Mirai Management, 9(1), 1169-1183. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/7402

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta Bandung

Supraja, G. (2024, July). The Influence of Accounting Information Systems in Mediating the Quality of Financial Reports on the Performance of MSMEs in Medan. In Proceeding of the International Conference on Business and Economics (Vol. 2, No. 2, pp. 55-61). https://doi.org/10.56444/icbeuntagsmg.v2i2.1921

Susanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28057

Sutrisno, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Triastuti, S. A. (2026). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Demak. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 423-449. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i2.6433

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Birokrasi, 155-169. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. Digital Business Journal, 1(1), 64-77. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah kota manado (studi di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah kota manado). Jurnal Eksekutif, 2(5), 1-13. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31423